

KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

Shinta Ina Mustika

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : sintamustika662@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal ini dilihat dari rata-rata jawaban informan pada 5 dimensi masih terdapat dimensi yang belum berjalan dengan baik, yaitu dimensi produktivitas, dimensi kualitas layanan, dimensi responsibilitas kinerja dan dimensi akuntabilitas. Dan hanya dimensi dimensi responsivitas kinerja yang sudah berjalan cukup optimal.

Kata Kunci : *Kinerja, Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat sangat penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di segala bidang seperti ekonomi, sosial dan politik. Namun kesejahteraan masyarakat desa masih tergolong rendah dan situasi ekonomi masih berkembang, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia

perlu lebih ditingkatkan melalui pemberdayaan daerah dan desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Undang-undang tersebut mengakui penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah desa, pemerintah pusat telah meningkatkan anggarannya, diantaranya melalui anggaran dana desa. Ekonomi pedesaan merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat dalam pengembangan sistem ekonomi desa. Dengan semakin terbukanya perekonomian daerah, maka pembangunan desa ke depan akan semakin menantang, namun sampai saat ini desa belum melepaskan diri dari pola keterbelakangan dan kemiskinan yang lama. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan sudah sewajarnya menjadi prioritas utama dari semua kebijakan dan rencana strategis pembangunan di Indonesia. Jika tidak, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan akan semakin besar, terutama di bidang ekonomi.

Dalam Peraturan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa, yang digunakan untuk mengelola perusahaan, menggunakan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, memberikan pelayanan dan/atau menyediakan jenis kegiatan lainnya. Hal tersebut dapat menjadikan dasar kepada penduduk desa untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan mengembangkan kegiatan tersebut agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat yang ada di desa. Selanjutnya juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa didefinisikan sebagai Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur Badan Usaha Milik Desa adalah desa-desa tersebut. Bagi badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, kepemilikan dan pengelolaan permodalannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Kinerja adalah gambaran capaian yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan atau rencana atau kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi. Daftar tujuan yang harus dicapai dituangkan dalam rumusan rencana strategis organisasi. Secara umum kinerja merupakan pencapaian suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, Kurniawan (2013:5). Kinerja BUMDes menggambarkan tingkat realisasi misi dan visi yang tertuang dalam rencana strategis. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa adalah untuk memperoleh pendapatan asli desa dengan mengelola potensi yang ada di desa, memajukan perekonomian desa, dan mensejahterakan masyarakat.

Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan Badan Usaha Milik

Desa, Badan Usaha Milik Desa perlu memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan program-programnya. Memahami keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Desa adalah hal-hal yang mempengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Desa adalah kepemimpinan, sumber daya manusia, sosialisasi dan tradisi masyarakat.

Di desa Sukajaya masih banyak permasalahan dan keluhan seperti salah satunya masalah perekonomian. Kurangnya lapangan kerja sehingga masih banyaknya warga yang belum mendapatkan pekerjaan di desa Sukajaya. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjalankan program Badan Usaha Milik Desa di desa tersebut. Dengan adanya jenis usaha di desa tersebut dapat menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat bahwa kinerja Badan Usaha Milik Desa belum dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Pengurus Badan Usaha Milik Desa belum dapat menjalankan

funksinya dengan baik, yakni pengurus dalam hal mengelola Badan Usaha Milik Desa belum mampu menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat di desa dan unit-unit usahanya, sehingga dapat diketahui bahwa kinerja Badan Usaha Milik Desa belum produktif,

2. Kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Usaha Milik Desa masih belum terpenuhi, hal ini terlihat dari struktur organisasi atau pengelola unit usaha yang kurang dan sisi kompetensi masih rendah akibat dari kemampuan pengurus yang belum dilaksanakannya pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus
3. Pengurus Badan Usaha Milik Desa belum mampu melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di desa Sukajaya.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001:329).

Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja organisasi public, Dwiyanto (1995:72), yaitu sebagai berikut.

1. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.
3. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan

organisasi publik itu kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas
Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bumdes menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli desa (PADesa).

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:85), "BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa". Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

Menurut Purnomo (2004:84) maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa yakni maksud

pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah :

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun aspek kajian dalam penelitian ini adalah mengukur kinerja organisasi publik, berdasarkan pendapat Dwiyanto, (1995:71), yaitu sebagai berikut: 1) Produktivitas, 2) Kualitas layanan, 3) Responsivitas, 4) Responsibilitas dan 5) Akuntabilitas. Informan yang berkaitan dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua BUMDes, Direktur BUMDes, Pengurus BUMDes, Pengurus Unit BUMDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh masyarakat, yaitu sebanyak 15 orang. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sehingga peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun aspek kajian dalam penelitian ini adalah mengukur kinerja organisasi publik, berdasarkan pendapat Dwiyanto, (1995:71), yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi produktivitas dapat diketahui bahwa produktivitas BUMDes belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat diketahui dari hasil rata-rata jawaban informan dari 3 indikator masih terdapat 2 indikator yang belum berjalan dengan baik, yaitu indikator adanya pekerja dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan unit-unit usaha yang ada di BUMDes dan indikator adanya program yang memiliki kualitas baik yang dihasilkan oleh para pengurus unit usaha yang ada di BUMDes

Hambatan-hambatan pada pada dimensi Produktivitas Kinerja BUMDes Sukajaya adalah rendahnya minat masyarakat untuk bekerja di BUMDes dikarenakan masyarakat lebih memilih bekerja di pabrik dengan

pendapatan yang sudah jelas, kecilnya pendapatan sehingga dapat menghambat kegiatan usaha dan mengakibatkan tingkat kepuasan konsumen berkurang, pendekatan anggaran yang masih minim sehingga untuk pengembangannya perlu tindak lanjut melalui kerjasama dengan pihak investor atau memohon bantuan kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat dan rendahnya kemampuan pengelola dan hal managerial.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam dimensi Produktivitas Kinerja BUMDes Sukajaya adalah melakukan regenerasi untuk pegawai baru dengan proses penjurangan dan penyaringan sehingga dapat menghasilkan pegawai yang sesuai dengan kriteria dan bobot pekerjaan yang akan di kerjakannya, mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada para pengurus unit usaha BUMDes untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dan berdaya saing dan berupaya untuk mengajukan proposal bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk dapat menanggulangi masalah keterbatasan BUMDes dalam hal keuangan.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa rendahnya produktivitas BUMDes Sukajaya disebabkan oleh pencapaian dengan hasil yang diperoleh seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti, (2001:57), produktivitas adalah

bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu.

Dengan demikian bahwa rendahnya produktivitas Kinerja BUMDes Sukajaya dikarenakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat dominan terutama pada unsur sumber daya manusia di tubuh pengelola BUMDes, yakni belum memiliki kemampuan untuk membangun kinerja organisasi sehingga pada dimensi produktivitas masih berjalan dengan optimal.

2. Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Kualitas Layanan dapat diketahui bahwa belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat diketahui dari rata-rata jawaban informan pada 4 indikator yang diukur, masih terdapat 2 indikator yang belum berjalan dengan baik, yaitu indikator kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, seperti adanya komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi dan indikator adanya sikap yang tegas dari pengelola tetapi penuh perhatian terhadap konsumen.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes Sukajaya khususnya bagian pelayanan masih perlu adanya peningkatan fasilitas fisik serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai demi peningkatan

pelayanan administrasi kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedia sarana teknologi telekomunikasi dan informatika dan UU No. 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik

Hambatan-hambatan pada pada dimensi Kualitas Layanan BUMDes Sukajaya adalah kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, seperti komputer, ruang tunggu dan tempat informasi masih terbatas. Dalam hal ini BUMDes Sukajaya belum memiliki kantor yang representatif, hanya di tempatkan di bekas ruangan kantor desa yang tidak terpakai dengan ruang tunggu yang terbatas dan meja kursi tamu hanya satu set dan komputer PC hanya 1 unit dan kursi panjang yang diperuntukan bagi masyarakat yang menunggu pelayanan dan kemampuan untuk bersikap ramah serta sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen berkaitan pelayanan kepada masyarakat baik sebagai mitra maupun sebagai konsumen belum dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat karena adanya penurunan jumlah pelanggan yang ada di agen BRI Link dan berpindah ke agen yang lain.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam dimensi Kualitas Layanan Kinerja BUMDes Sukajaya adalah mengajukan permohonan kantor BUMDes beserta fasilitas pendukungnya kepada pemerintah desa dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas individu para pengelola agar mampu bersikap yang tegas tetapi penuh perhatian terhadap konsumen.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa masih kurangnya Kualitas Layanan BUMDes Sukajaya disebabkan oleh factor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas layanan itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Parasuraman, (1988:23) adalah sebagai berikut : “kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan”.

Dengan demikian bahwa rendahnya kualitas pelayanan Kinerja BUMDes Sukajaya dikarenakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat dominan terutama pada kualitas sarana dan prasarana kantor yang representatif, yakni dari mulai bangunan kantor, perlengkapan dan sarana penunjang kantor untuk pelayanan masyarakat.

3. Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi responsivitas kinerja BUMDes dapat diketahui bahwa produktifitas

kinerja sudah optimal, hal tersebut dapat diketahui dari rata-rata informan pada 4 indikator yang diukur hanya 1 indikator yang belum berjalan dengan optimal yaitu indikator petugas melakukan pelayanan dengan cepat kepada para pelanggan di setiap unit-unit usaha di BUMDes

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa responsivitas kinerja BUMDes Sukajaya sudah terdapat kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Hormon, (1995:152) responsivitas (*responsiveness*) adalah kemampuan pemerintah (organisasi) untuk mengenali kebutuhan, menyusun agenda dan prioritas, mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Disini responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh Organisasi publik responsivitas organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Hambatan-hambatan pada pada dimensi responsivitas kinerja BUMDes Sukajaya adalah pengelola belum mampu melakukan respon cepat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga

pelanggan kurang merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh para petugas di unit usaha BUMDes, pengurus BUMDes belum mampu melakukan pelayanan dengan tepat kepada permintaan pelanggan BUMDes. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pelanggan yang ada di unit usaha sewa mesin cor pada saat mesin tersebut disewa ternyata tidak bisa digunakan dan pengelola tidak mampu untuk memperbaikinya dan kurangnya kesediaan petugas dalam melakukan pelayanan dengan cermat kepada semua pelanggan di masing-masing usaha BUMDes.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam dimensi responsivitas Kinerja BUMDes Sukajaya adalah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas individu para pekerja agar mampu bersikap ramah, sopan dan cepat dalam pelayanan serta sesuai dengan norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian bahwa sudah cukup baiknya responsivitas Kinerja BUMDes Sukajaya dikarenakan adanya keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh Organisasi publik responsivitas organisasi tersebut dinilai semakin baik.

4. Responsibilitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi responsibilitas kinerja BUMDes dapat diketahui bahwa

responsibilitas kinerja belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat diketahui dari rata-rata informan pada 3 indikator masih terdapat 2 indikator yang belum berjalan dengan baik, yaitu indikator adanya kesadaran dari pengelola untuk bisa lebih memahami dan mengerti semua resiko dari perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi dan indikator keberanian dari para pengurus untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam meningkatkan usaha BUMDes.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa masih kurangnya responsibilitas kinerja BUMDes Sukajaya disebabkan oleh ketentuan-ketentuan administrasi organisasi dan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan untuk menunjang kualitas tanggungjawab pegawai terhadap kinerja belum dapat berjalan dengan optimal.

Hambatan-hambatan pada pada dimensi Responsibilitas Kinerja BUMDes Sukajaya adalah kesadaran dari pengelola untuk bisa lebih memahami dan mengerti semua resiko dari perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi belum memenuhi kualitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti masih kurangnya adanya kesadaran para pekerja di jasa sewa mesin cor dalam hal kesadaran untuk memelihara dan merawat mesin setelah digunakan dan adanya pekerjaan pengelola berkiatan dengan laporan pertanggungjawaban BUMDes masih terlambat, sehingga perlu adanya

pembinaan dan peningkatan kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia yang ada di BUMDes secara berkelanjutan.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam dimensi Responsibilitas Kinerja BUMDes Sukajaya adalah terus mendorong semangat kerja kepada seluruh pengurus dan lebih bertanggungjawab serta melaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengurus BUMDes yang professional.

Menurut Dwiyanto, (2008:143) mengemukakan responsibilitas atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.

Dengan demikian bahwa rendahnya responsibilitas kinerja BUMDes Sukajaya dikarenakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat dominan terutama pada pengelola yang belum memiliki keberanian untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan dalam meningkatkan usaha BUMDes, akhirnya mereka belum dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan, masih perlu pembinaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas bagi para pengelola.

5. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi akuntabilitas dapat diketahui bahwa akuntabilitas kinerja BUMDes belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat diketahui dari rata-rata informan pada 3 indikator masih terdapat 2 indikator yang belum berjalan dengan baik, yaitu indikator adanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan dapat diketahui oleh masyarakat dan indikator kepatuhan dari semua pengelola terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa masih kurangnya Kualitas Layanan BUMDes Sukajaya disebabkan oleh faktor-faktor pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus.

Hambatan-hambatan pada pada dimensi akuntabilitas BUMDes Sukajaya adalah adanya pekerjaan pengelola berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban BUMDes masih terlambat, sehingga perlu adanya pembinaan dan peningkatan kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia yang ada di BUMDes secara berkelanjutan dan masih kurangnya kepatuhan dari semua pengelola terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam dimensi akuntabilitas Kinerja BUMDes Sukajaya adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia yang ada di BUMDes secara

berkelanjutan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait penyelesaian pekerjaan yakni selesainya pekerjaan secara fisik dan administrasi yang sesuai dengan target dan capaian dalam rencana kerja BUMDes.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo, (2004:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dengan demikian bahwa rendahnya kualitas pelayanan Kinerja BUMDes Sukajaya dikarenakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat dominan terutama pada masalah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan dapat diketahui oleh masyarakat masih belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal ini dilihat dari rata-rata jawaban informan pada 5 dimensi masih terdapat

indikator-indikator dari 5 dimensi tersebut yang belum berjalan dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Usaha Milik Desa masih belum terpenuhi dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa belum mampu melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di desa Sukajaya.

Hambatan-hambatan dalam Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran antara lain adalah terbatasnya jumlah pekerja yang ada dalam unit-unit usaha di BUMDes, terhambat dengan masalah anggaran untuk pengembangannya dan program-program yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik sehingga belum dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat disekitar. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, antara lain melakukan pembukaan pendaftaran terbuka untuk pegawai baru dengan proses penjangkaran dan penyaringan, mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada para pengurus unit usaha BUMDes, mengajukan proposal

bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk dapat menanggulangi masalah keterbatasan BUMDes dalam hal keuangan dan mengajukan permohonan kantor BUMDes beserta fasilitas pendukungnya kepada pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. 1988. "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality". *Journal of Retailing*. Vol 64 (1) pp 12- 37.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajahma.
- _____. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, Borni. 2013. *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah. Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*. Lombok Timur: Makalah BPMPD.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Artikel dan Jurnal**
- Hormon. 1995. *Analisis Responsivitas Pelayanan Publik Studi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 2.
- Undang-undang**
- Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.